

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 6  
TAHUN 2013 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR  
OLEH : Firda Yuliana**

**ABSTRAK**

*Mekanisme pelaksanaan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berlangsung kurang efektif yaitu dengan adanya warga binaan pemasyarakatan yang masih melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. seperti adanya warga binaan pemasyarakatan yang memiliki Handphone dan melakukan perkelahian antar warga binaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yaitu faktor internal lembaga pemasyarakatan ialah masalah individu yang berupa masalah umum maupun masalah pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan faktor eksternal berupa kapasitas sarana dan prasarana kamar hunian warga binaan pemasyarakatan dan fasilitas pengamanan diri bagi Petugas Lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup> Dalam pemerintahan suatu Negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Hal ini berarti setiap individu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 pasal 1

harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>2</sup>

Di dalam system pemidanaan Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, melainkan merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat. Dalam menjalani pidananya, ada peraturan-peraturan yang diwajibkan dilaksanakan oleh narapidana

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakkan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (2)

ten tram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut. dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.

Begitupun halnya dengan Penegakkan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan penenganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk mempebaiki dan mendidik warga binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu setiap petugas Pemasyrakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama berada di lembaga pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan, tata tertib wajib dipatuhi oleh setiap narapidana beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu indicator dalam menentukan kriteria

berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi hampir disemua Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar misalnya, gangguan keamanan dan ketertiban, terjadi dalam bentuk kerusuhan antar narapidana, melakukan penyerangan terhadap petugas dan lain sebagainya.

Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba melakukan kajian atau penelitian dengan judul '**Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.**

## **PEMBAHASAN**

Dalam pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut :

Pemasyaraatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidna supaya nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan baik.<sup>3</sup>

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik di tinjau dari system, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas

---

<sup>3</sup> Nashriana,S.H.,M.Hum. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, hal 153

permasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakkan hukum.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan<sup>5</sup>.

Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) dalam peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*return to a normal and productive life*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>6</sup>

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Permasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Menurut usia

- 1) Lembaga Permasyarakatan untuk anak
- 2) Lembaga Permasyarakatan khusus pemuda
- 3) Lembaga Permasyarakatan untuk dewasa

b. Menurut jenis kelamin

- 1) Lembaga Permasyarakatan khusus wanita
- 2) Lembaga Permasyarakatan khusus laki-laki

c. Menurut kapasitasnya

- 1) Lembaga Permasyarakatan Kelas I
- 2) Lembaga Permasyarakatan Kelas II

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, hal. 109

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Permasyarakatan* pasal 1 angka 3.

<sup>6</sup> Ibid. Hlm.226

### 3) Lembaga Perasyarakatan Kelas III

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan di tegaskan bahwa:

Sistem pemsayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan perasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Waga Binaan Perasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab <sup>7</sup>

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakkan hukum pidana, oleh Karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. System pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan tata tertib pemasyarakatan di indonesia saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap warga binaan.

Dalam upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, maka dalam kesempatan yang sama penulis juga

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (2).

<sup>8</sup> Dwidja P. op.cit. hal.103

melakukan wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Petugas Lapas mengungkapkan bahwa pelanggaran yang terjadi antar sesama tahanan seperti kasus perkelahian disebabkan karena banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana, selain itu masalah individu juga sangat memicu timbulnya masalah di dalam tahanan. Untungnya sejauh ini pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana di tangani dengan baik oleh petugas lembaga pemasyarakatan sehingga tidak ada jatuhnya korban.

#### **1. Mekanisme pelaksanaan tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar**

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai pelaksanaan tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yaitu pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Tahun 2013 Tentang Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Kewajiban Narapidana tersebut mengarah ke kegiatan pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang wajib diikuti oleh setiap Narapidana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 1995 sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan sebagai berikut :

##### **a. Pengayoman**

Yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan

pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna didalam masyarakat nantinya.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yaitu mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan didalam lembaga pemasyarakatan, tanpa membedakan narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya

c. Pendidikan

Yaitu warga binaan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Anantara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan,keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

d. Pembimbingan

Yaitu warga binaan mendapatkan pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Dengsn dilakukan pendidikan dan pembinaan keterampilan.

e. Penghormatan harkat dan maratabat manusia

Yaitu dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana layaknya seorang manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan Tata Tertib sering terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, maka penegakkan hukum sangat diperlukan dalam penangan pelanggaran peraturan disiplin tersebut. Tujuan hukuman disiplin

---

<sup>9</sup> Nash rhiana, op. dt. hal.155-158



sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki atau mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib:

- a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, dan
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.<sup>10</sup>

Warga Binaan Pemasyarakatan juga harus mentaati Tata Tertib yang harus dipertahankan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 4 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan. Berikut Sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Jenis hukuman atau sanksi narapidana/tahanan Lapas
  - a. Hukuman disiplin tingkat ringan
    - 1) Memberikan peringatan secara lisan
    - 2) Memberikan peringatan secara tertulis
  - b. Hukuman disiplin tingkat sedang
    - 1) Memasukkan kedalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
    - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurung waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
    - 3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan

---

<sup>10</sup>Dwidja Priyatno. 2013. Sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia. Cetakan-3. Bandung:Reflika Aditama,hal 119

c. Hukuman disiplin tingkat berat

- 1) Memasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

**2. Faktor yang menyebabkan pelanggaran tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013**

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yaitu faktor internal maupun eksternal. Dimana faktor internal lembaga pemasyarakatan yaitu masalah individu yang berupa masalah umum maupun masalah pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kapasitas kamar yang tidak memadai (over kapasitas) dapat memicu terjadinya perkelahian antar Warga Binaan Pemasyarakatan.

**Kesimpulan**

Mekanisme pelaksanaan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berlangsung kurang efektif yaitu dengan adanya warga binaan pemasyarakatan yang masih melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. seperti adanya warga binaan pemasyarakatan yang memiliki Handphonedan melakukan perkelahian antar warga binaan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yaitu faktor internal lembaga pemasyarakatan ialah masalah individu yang berupa masalah umum maupun masalah pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan faktor eksternal berupa kapasitas sarana dan prasarana kamar hunian warga binaan pemasyarakatan dan fasilitas pengamanan diri bagi Petugas Lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Mahrus. 2015.*Dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Effendi Erdianto. 2011. *Hukum pidana indonesia suatu pengantar*. Bandung: Refika aditama

Effendi Tolib. 2015. *Dasar-dasar hukum acara pidana*. Malang : Setara Press

Fatoni Syamsul. 2016. *Pembaharuan system pemidanaan (perspektif teoritis dan pragmatis untuk keadilan)*. Malang: Setara Press

Husin Kadri. Husin Rizki Budi. 2016, *Sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Nashriana. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Panduan pedoman penulisan skripsi. Makassar. CV berkah utami Prasetyo Teguh 2011, *Hukum pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Priyatno Dwidja. 2013. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika aditama

Renggong Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Prenamedia Group.

Widod. 2009. *Sistem pemidanaan dalam cyber crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Zulva Achjani Eva. 2017. *Perkembangan system pemidanaan dan system pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Pers.